

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3677);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp 99.503.343.714.069 (sembilan puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu enam puluh sembilan rupiah) terdiri dari :
 - a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 87.630.256.978.561 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 11.900.086.735.508 (sebelas triliun sembilan ratus miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 87.630.256.978.561 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) terdiri dari :
 - a. Penerimaan pajak sebesar Rp 57.339.900.457.441 (lima puluh tujuh triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 20.137.068.462.051 (dua puluh triliun seratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh satu rupiah);
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 10.153.228.059.069 (sepuluh triliun seratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Rincian pendapatan negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

Pasal 2

- (1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp 98.512.826.986.335 (sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari :
 - a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 62.561.086.530.199 (enam puluh dua triliun lima ratus enam puluh satu miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dirinci menurut sektor :

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp 54.467.377.929
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp 469.879.299.493
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp 26.226.914.359
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp 117.411.198.055
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp 35.299.326.741.669
06 SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp 254.604.190.913

07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 114.430.166.451
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp 48.529.248.656
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp 9.523.302.041.842
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp 179.961.043.942
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 3.692.139.219.853
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp 238.778.014.178
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp 518.331.153.211
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp 11.671.113.232
15	SEKTOR AGAMA	Rp 995.693.207.027
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp 307.343.742.134
17	SEKTOR HUKUM	Rp 550.669.463.771
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp 3.809.080.858.416
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp 1.099.507.893.068
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp 5.249.733.644.000
b.	Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 35.951 740.456.136 (tiga puluh lima triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah). dirinci menurut sektor :	
01	SEKTOR INDUSTRI	Rp 1.133.343.841.477
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp 1.308.337.575.033
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp 2.101.635.614.237
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp 197.140.678.594
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp 1.680.743.373.163
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp 5.655.449.321.603
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 3.252.272.271.093
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp 570.877.880.422
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp 7.156.401.320.958
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp 564.512.320.756
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 3.849.211.636.884
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp 332.692.258.142
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp 1.277.568.563.697
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp 1.365.837.073.398
15	SEKTOR AGAMA	Rp 281.967.467.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp 554.837.671.129
17	SEKTOR HUKUM	Rp 150.836.177.000
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp 836.812.324.808
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp 184.349.463.568
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp 3.496.913.623.174

(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp 1.017.516.727.734 (satu triliun tujuh belas miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 176

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

UMUM

Perhilungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhilungan dan pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dalam Perhilungan Anggaran Negara Tahun 1996/1997 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 1.017.516.727.734 (satu triliun tujuh belas miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1995/1996 sebesar Rp 6.607.681.796.421 (enam triliun enam ratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1996/1997 menjadi sebesar Rp 7.625.198.524.155 (tujuh triliun enam ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Jumlah SAL kumulatif tersebut sudah termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut :

RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)

Penerimaan pajak	157.339.900.457.441
0110 Pajak penghasilan (PPh)	27.062.110.847.687
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN)	20.351.207.294.395
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	2.413.154.639.483
0210 Penerimaan bea masuk	2.578.881.781.217
0220 Penerimaan cukai	4.262.836.727.393
0230 Penerimaan Pajak ekspor/pungutan ekspor	80.985.987.697
0240 Bea meterai	535.338.217.622
0250 Bea lelang	55.384.961.947
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam	20.137.068.462.051
0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam	20.137.068.462.051
0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM)	
Penerimaan negara bukan pajak	10.153.288.059.069
0410 Penerimaan pendidikan	57.928.970.707
0411 Uang pendidikan	55.421.315.419
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat dan akhir pendidikan	1.185.272.312
0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek	220.000
0419 Penerimaan pendidikan lainnya	1.322.162.976
0420 Penerimaan pendidikan swadana	319.480.773.070
0481 Penerimaan pendidikan swadana	319.480.773.070
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	26.664.229.464
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan	874.535.491

0512 Pe!ljualan hasil peternakan 804.g00.761
0513 Penjualan hasil perikanan 386.423.430
0514 Penjualan hasil sitaan 7.303.014.748
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi 37.369.011
0516 Penjualan penerbitan, film. dan hasil cetakan
lainnya 222.193614
0517 Pe:ljualan dokumen-dokumen pelelangan 10.496.067.986
0519 Penjualan lainnya 6.539.g23.423
0520 Penjualan aset tetap 29.698.723.974
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan. dan tanah 7.389.620.873
0522 Penjualan kendaraan bermotor 620.696.413
0523 Penjualan sewa beli I 8.931.395.182
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak,
dihapuskan 2.757.011.506
0530 Penerimaan sewa 12.392.27g.509
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri 4.279061.145
0532 Sewa gedung. bangunan, gudang 3.263.323.067
0533 Sewa benda-benda bergerak 3.866.896.741
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 982.997.556
0540 Penerimaan jasa I 600.718.099.158
0541 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan
lainnya 10.394.951.455
0542 Penerimaan tempat hiburan. taman. museum 203.793.138
0543 Penerimaan surat keterangan, visa. paspor dan
SIM. STNK, BPKB 99.140572.396
0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah 112725.551.566
0545 Pemberian hak dan perijinan 33.446.7821.316
0546 Penerimaan sensor. karantina. pengawasan.
pemeriksaan 7.34g.871902
0547 Penerimaan jasa tenaga kerja, jasa pekerjaan 10507.129. 795
0548 Penerjmaan jasa kantor urusan agama 4764 718 722
0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan 21.164.688.868
0550 Penerimaan jasa II 750.713.714.052
0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 443.294.914.931
0552 Penerimaan iuran hasil hutan. Hasil laut royalti
dan denda 130.812.781.985
0553 Penerimaan iuran lelang unluk fakir miskin 3.898.166.489
0554 Penerimaan jasa kantor catatan sipil 11.064.598.730
0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara
dengan surat paksa 710.977.542
0556 Penerimaan uang pewarganegaraan 2.107.108.775
0559 Penerimaan jasa lainnya 158.825.165.600
0560 Penerimaan rutin dari luar negeri 30.921.039.516
0561 Bea visa dan paspor
0562 Bea konsuler
0563 Bea marilim
0564 Bea pemeriksaan
0565 Bea legalisasi dan pembualan sural keterangan
0566 Bea legalisasi sural-sural perdagangan
0569 Penerimaan rulin lainnya dari luar negeri 30.921.039.516
0580 Pencrimaan penjualan, sewa dan jasa swadana 1.695.829.797.368
0581 Penerimaan penjualan swadana 1.920.157457
0582 Penerimaan sewa swadana ..343.746. 748
0583 Penerimaan jasa swadana 1.692.565.893.127
0610 Penerimaan kejaksaan dan peradilan 33.291.708.120
0611 Legalisasi landa tangan 74.721.737
0612 Pengesahan surat di bawah tangan 13.452.250
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panilera badan
pengadilan 464959.656
0614 Hasil denda. denda lelang dan sebagainya 25.397.228.110
0615 Ongkos perkara ! 1.524.899.513
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 5.816.446.854
0710 Pencrimaan dari inveslasi 5.2tl,364.314,798
0711 Bagian laba dari BUMN 2649.852.747.596
0713 Pelunasan piutang (penerimaan kcmbali pinjaman) 2.561.511567.202
0810 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran

berjalan 66.830583.796
 0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 7,219.398.697
 0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 7031453543
 0813 Penerimaan kembali belanja pensiun 36.514.330.044
 0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 1.696.827.121
 0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya 14.264.628.543
 0816 Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun anggaran berjalan 103.895.848
 0817 Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi bea masuk 50.000
 0820 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu 20.570.815.313
 0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 6.951966.988
 0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 2.880.392.842
 0823 Penerimaan kembali belanja pensiun 3.432.047828
 0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 1.306.138.486
 0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya 5.968.526.424
 0826 Pembetulan pembukuan PPN. PPh. tahun anggaran yang lalu 31.742.745
 0880 Penerimaan lain-lain swadana 15860.516.865
 0881 Penerimaan lain-lain swadana 15.860.516.865
 0890 Penerimaan lain-lain 1.281.022.495.359
 0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji 1.673.780.564
 0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 9.099.989.999
 0893 Penerimaan kembali ganti rugi 5.951.011.785
 0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihifKPKN 461.540.201.190
 0899 Penerimaan anggaran lainnya 802.757.511.821
JUMLAH 87630.256.978.561

RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN TAHUNANGGARAN 1996/1997

-(dalam rupiah)

0910 Banluan Program
 0920 Banluan Proyek 11.900.086.735.508
JUMLAH 11.900.086.735.508

Pasal 2

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut :

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1996/1991

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
01.1	Subsektor Industri	54.467.377.929
	Jumlah Sektor Industri	54.467.377.929
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
02.1	Subsektor Pertanian	125.072.006.040
02.2	Subsektor Kehutanan	344.807.293.453
	Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan	469.879.299.493
03	SEKTOR PENGAIRAN	
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	12.969.403.368
03.2	Subsektor Irigasi	13.257.510.991
	Jumlah Sektor Pengairan	26.226.914.359
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	117.411.196.055
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	117.411.196.055
05	SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL KEUANGAN DAN KOPERASI	
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	55.152.109.932
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	29.925.116059
05.4	Subsektor Keuangan	5.134.442.315.359

05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	79.807.200.319
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	35.299.326.741.669
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
06.1 Subsektor Prasarana Jalan	18.615.837.188
06.2 Subsektor Transportasi Darat	17.649.258.221
06.3 Subsektor Transportasi Laut	133.504.024.072
06.4 Subsektor Transportasi Udara	46.025.515.637
06.5 Subsektor Meleorologi. Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	38.809.555.795
Jumlah Sektor Transportasi. Meteorologi dan Geofisika	254.604.190.913
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
07.1 Subsektor Pertambangan	110.287.006.798
07.2 Subsektor Energi	4.143.159.653
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	114.430.166.451
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
08.1 Subsektor Pariwisata	31.679.370.850
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	16.849.877.806
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	48.529.248.656
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	9.470.383.555.516
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	52.918.486.326
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	9.523.302.041.842
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	6.973.543.034
10.2 Subsektor Tata Ruang	172.987.500.908
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	179.961.043.942
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN Y ANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1 Subsektor Pendidikan	3.66.230.924.757
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	244.182.452.797
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang MahaEsa	73.689.310.413
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	8.036.531.886
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional.Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	3.692.139.219.853
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
12.1 Subsektor kependudukan dan Keluarga Berencana	238.778.014.178
Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	238.778.014.178
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	93.682.599.603
13.2 Subsektor Kesehatan	424.648.553.608
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial. Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja	518.331.153.211
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman	8.577.178.233
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	3.093.937.999
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	11.671.113.232
15 SEKTOR AGAMA	
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	165.873.481.098
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	829.819.725.929
Jumlah Sektor Agama	955.693.207.027
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	200.331.914.948
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	26.628.908.163
16.5 Subsektor Kedirgantaraan	1.412.246.175
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	78.970.672.848
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	307.343.742.134
17 SEKTOR HUKUM	
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	473394.355.948
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	77.275.107.823
Jumlah Sektor Hukum	550.669.463.771
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	

18.1 Subsektor Aparatur Negara	3.581.324.933.179
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	227.755.925.237
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	3.809.080.858.416
19 SEKTOR POLITIK. HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN. KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
19.1 Subsektor Politik	66.140.482.474
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	754.850.889.956
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	278.516.520.638
Jumlah Sektor Politik. Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	1.099.507.893.086
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
20.1 Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	5249.733.644.000
20.2 Subsektor Pendukung Jumlah Sektor Pertahanan dan keamanan	5.249.733.644.000
JUMLAH	62.561.086.530.199

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI	1.004.617.898.477
Jumlah Sektor Industri	1.004.617.898.477
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
02.1 Subsektor Pertanian	1.719.058.852.033
02.2 Subsektor Kehutanan	8.488.455.000
Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan	1.027.547.307.033
03 SEKTOR PENGAIRAN	
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	368.499.502.714
03.2 Subsektor Irigasi	878.305.937.603
Jumlah Sektor Pengairan	1.246.440.317
04 SEKTOR TENAGA KERJA	
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	135.627.426.594
Jumlah Sektor Tenaga Kerja	135.627.426.594
05 SEKTOR PERDAGANGAN. PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL. KEUANGAN DAN KOPERASI	
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	25.850.928.000
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	40.281.732.702
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	1.136.492.434.592
05.4 Subsektor Keuangan	2.529.980.000
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	81.656.624.869
Jumlah Sektor Perdagangan. Pengembangan Usaha Nasional. Keuangan dan Koperasi	1.286.811.700.163
06 SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
06.1 Subsektor Prasarana Jalan	3.280.287.172.600
06.2 Subsektor Transportasi Darat	320.819.933.714
06.3 Subsektor Transportasi Laut	221.614.912.000
06.4 Subsektor Transportasi Udara	1.84.421.238.749
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelarnatan (SAR)	13.331.255.000
Jumlah Sektor Transportasi. Meteorologi dan Geofisika	4.020.474.512.063
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
07.1 Subsektor Pertambangan	42.818.907.000
07.2 Subsektor Energi	841.074.477.093
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	883.893.384.093
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
08.1 Subsektor Pariwisata	43.693.022.000
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	38.250.817.422
Jumlah Sektor Pariwisata. Pos dan Telekomunikasi	81.943.839.422
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	5.534.350.543.000
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	1.024.101.907.000
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah Transmigrasi	6.558.452.450.000
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	261.429.917.000
10.2 Subsektor Tata Ruang	60.246.154.000
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup Tata Ruang	321.676.071.000
11 SEKTOR PENDIDIKAN. KEBUDAYAAN NASIONAL. KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA. PEMUDA DAN OLAHRAGA	
11.1 Subsektor Pendidikan	2.727.195.006.215
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	124.487.843.577
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan	

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	65.506.398500
11.4 Subsektor Pemuda dan OlahRaga	42.917.710.000
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	2.960.106-958.292
12 SEKTOR SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	313.160.232.800
Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	313.160.232.800
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA ANAK DAN REMAJA	
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	91.809.569.850
13.2 Subsektor Kesehatan	904.019.613.947
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	16.770.749.000
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	1.012.599.932.797
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
14.1 Subsektor Perumahan dan Perrnukiman	520.086.485.280
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	32.017.510.000
Jumlah Sektor Perumahan dan Perrnukiman	552.103.995.280
15 SEKTOR AGAMA	
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	55.051.113.000
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	152.119.873.000
Jumlah Sektor Agama	207.170.986.000
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	203.060.053.152
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	83.181.833.000
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	67.213.898.000
16.4 Subsektor Kelautan	27.404.699.500
16.5 Subsektor Kedirgantaraan	23.265.005.462
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	112.159.656.000
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	516.285.145.114
17 SEKTOR HUKUM	
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	10.992.141.000
17.2 Subsektor Pembinaa, Aparatur Hukum	40.784.805.000
17.3 Subsektor Sarana dan prarana Hukum	97.100.542.000
Jumlah Sektor Hukum	148.877.488.000
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
18.1 Subsektor Aparatur Negara	598.685.949.408
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	27.446.776.000
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	626.132.725.408
19 SEKTOR POLITIK,HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
19.1 Subsektor Politik	20.462.494.100
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	10.827.304.000
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	117.204.962.468
Jumlah Sektor Politik, Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	148.494.760.568
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
20.1 Subsektor rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	741.861.000.000
20.2 Subsektor ABRI	246.536.877.897
20.3 SubsektorPendukung	10.473.589.310
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	998.871.467.207
JUMLAH	24.051.653.720.628

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI	
01.1 Subsektor Industri	128.725.943.000
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
02.1 Subsektor Pertanian	280.674.590.000
02.2 Subsektor Kehutanan	115.678.000
Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan	280.790.268.000
03 SEKTOR PENGAIRAN	
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	493.909.086.440
03.2 Subsektor Irigasi	360.921.087.480
Jumlah Sektor Pengairan	854.830.173.920
04 SEKTOR TENAGA KERJA	
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	61.513.252.000
Jumlah Sektor Tenaga Kerja	61.513.252.000

05 SEKTOR PERDAGANGAN.PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	19.429.000
05.2 Subsektor Pengembangan Luar Negeri	
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	168.935.509.000
05.4 Subsektor Keuangan	223.080.038.000
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	1.896.697.000
Jumlah Sektor Perdagangan. Pengembangan Usaha Nasional. Keuangan dan Koperasi	393.931.673.000
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
06.1 Subsektor Prasarana Jalan	877.087.991.540
06.2 Subsektor Transponasi Darat	325.868.942.000
06.3 Subsektor Transponasi Laut	281.048.846.000
06.4 Subsektor Transportasi Udara	148.460.526.000
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	2.508.504.000
Jumlah Sektor Transponasi, Meteorologi dan Geofisika	1.634.974.809.540
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
07.1 Subsektor Penambangan	275.605.031.000
07.2 Subsektor Energi	2.092.773.856.000
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	2368.378.887.000
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
08.1 Subsektor Pariwisata	1.315.456.000
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	487.618.585.000
Jumlah Sektor Pariwisata, pos dan Telekomunikasi	488.934.041.000
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	471.033.887.958
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	126.914.983.000
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	597.948.870.958
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
10.1 SubsektorLingkungan Hidup	198.751.664.000
10.2 Subsektor Tata Ruang	44.084.585.756
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	242.836-249.756
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1 Subsektor Pendidikan	836.119.400.592
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	52.953.945.000
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	9.083.000
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	22.200.000
Jumlah Sek.tor Pendidik.an, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemuda dan Olah Raga	889.104.678.592
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
12.1 Subsek.tor Kependudukan dan Keluarga Berencana	19.532.025.342
Jumlah Sek.tor Kependuduk.an dan Keluarga Sejahtern	19.532.025.342
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
13.1 Subscktor Kesejahteraan Sosial	9.818.758.000
13.2 Subsektor Kesehatan	255.149.878.900
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial. Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	264.968.630.900
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman	807.705.609.118
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	6.027.469.000
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	813.733.078.118
15 SEKTOR AGAMA	
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	63.383.018.000
152 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	11.413.463.000
JumlahSektorAgama	74.796.481.000
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	24.737.063.015
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	8.808.123.000
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Tek.nologi	
16.4 Subsektor Kelautan	3.344.928.000
16.5 Subsektor Kedirgantaraan	
16.6 SubsektorSistem Informasi dan Statistik	1.662.412.000
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	38.552.526.015
17 SEKTOR HUKUM	
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	1.958.689.000
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	

Jumlah Sektor Hukum	1.958.689.000
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
18.1 Subsektor Aparatur Negara	141.405.244.400
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	69.274.355.000
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	210.679.599.400
19. SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
19.1 Subsektor Politik	8.458.164.000
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	
19.3 Subsektor Penerangan. Komunikasi dan Media Massa	27.396.539.000
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	35.854.703.000
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	
20.2 Subsektor ABRI	2.498.042.155.967
20.3 Subsektor Pendukung	
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	2.498.042.155.967
JUMLAH	11.900.086.735.508

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3788

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1998, Buku 2.